

Efektivitas Dan Fleksibilitas Sistem Administrasi Pembiayaan Pendidikan Studi Kasus Di SDN 4 Parittiga

Sila Monika¹, Syifa Al Ghefira², Syabila Ayu³
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding email: silamonika4@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 10-05-2025
Received : 11-05-2025
Revised : 18-07-2025
Accepted : 26-07-2025

Keywords

Administrasi
Pembiayaan
Pendidikan
Sekolah Dasar
Efektivitas
Fleksibilitas

ABSTRACT

This study explores the effectiveness and flexibility of the financing administration system at SDN 4 Parittiga, focusing on the use of BOSP through the RKAS application. Using a qualitative case study with interviews, it identifies funding sources, management challenges, and reporting mechanisms. Findings show that while RKAS supports online reporting, mismatches with technical guidelines and the need for a simpler, more flexible system remain. The study offers insights for improving BOSP policies and RKAS development.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah efektivitas dan fleksibilitas administrasi pembiayaan di SDN 4 Parittiga melalui penggunaan BOSP pada aplikasi RKAS. Dengan studi kasus kualitatif dan wawancara, ditemukan sumber dana, tantangan pengelolaan, serta mekanisme pelaporan. Hasilnya menunjukkan meski RKAS mendukung pelaporan daring, masih ada ketidaksesuaian dengan juknis dan kebutuhan sistem yang lebih sederhana. Temuan ini memberi masukan bagi perbaikan BOSP dan pengembangan RKAS.

Pendahuluan

Pendidikan berperan sebagai pondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa, dan keberhasilannya sangat tergantung pada adanya dan pengelolaan sumber daya keuangan yang tepat dan efisien. Di Indonesia, pemerintah berusaha menjamin adanya anggaran pendidikan melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

BOSP menjadi salah satu aspek finansial penting bagi banyak sekolah, khususnya di tingkat dasar dan menengah, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan yang rutin.

Pengelolaan dana pendidikan yang tepat adalah unsur penting untuk memastikan bahwa dana yang ada bisa digunakan semaksimal mungkin guna meningkatkan mutu pembelajaran dan infrastruktur sekolah. Sistem administrasi yang optimal tidak hanya perlu mampu mendokumentasikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pemakaian dana dengan baik, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing lembaga pendidikan.

Dalam pengelolaan dana pendidikan, sering kali muncul isu anggaran tertentu yang tidak tertera dalam petunjuk teknis, sehingga tidak bisa direncanakan. Selain itu, harapan untuk sistem administrasi pembiayaan pendidikan ke depan adalah agar lebih baik, lebih luwes, dan tidak terlalu rumit dalam hal laporan.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Parittiga sebagai salah satu lembaga pendidikan tingkat dasar sangat bergantung pada dana BOSP sebagai sumber utama pembiayaannya, yang berasal dari APBN. Pengelolaan dana ini dilakukan melalui sistem dan aplikasi yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Namun, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan fleksibilitas dalam sistem administrasi pembiayaan pendidikan terkait dengan operasional sehari-hari sekolah.

Walau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) telah menjadi sumber utama pendanaan untuk lembaga pendidikan dasar seperti SDN 4 Parittiga, masih banyak tantangan yang muncul dalam pengelolaan dana, terutama yang berkaitan dengan anggaran yang tidak diterangkan dalam petunjuk teknis. Di samping itu, ada harapan akan adanya sistem administrasi yang lebih fleksibel dan tidak rumit dalam pelaporan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami secara rinci bagaimana sistem administrasi pembiayaan pendidikan, khususnya penggunaan dana BOSP dan aplikasi RKAS, dilaksanakan di SDN 4 Parittiga, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sistem pembiayaan pendidikan di SDN 4 Parittiga dijelaskan, dan apa saja sumber dana yang tersedia?
2. Apa saja kesulitan utama yang dihadapi SDN 4 Parittiga dalam pengelolaan dana pendidikan?
3. Bagaimana mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana dilaksanakan di SDN 4 Parittiga?
4. Apa harapan pihak SDN 4 Parittiga terkait dengan sistem administrasi pembiayaan pendidikan di masa depan?

Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana sistem administrasi pembiayaan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dana BOSP dan aplikasi RKAS, diaplikasikan di SDN 4 Parittiga.

Melalui studi kasus ini, akan diidentifikasi sumber-sumber dana yang tersedia, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana, serta mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang diterapkan, dan harapan dari pihak sekolah terhadap sistem administrasi keuangan pendidikan di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan fleksibilitas sistem administrasi keuangan pendidikan pada tingkat sekolah dasar, serta mengidentifikasi kemungkinan perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan dana pendidikan secara keseluruhan.

Metode

Untuk melengkapi informasi dari berbagai sumber, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai metode utama untuk mengumpulkan data. Wawancara dilaksanakan dengan seorang pendidik di SDN 4 Parittiga guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sistem pendanaan pendidikan, berbagai tantangan yang muncul dalam pengelolaan dana, cara pencatatan dan pelaporan, serta harapan seputar administrasi pembiayaan pendidikan di masa depan.

Informan utama dalam penelitian ini adalah seorang guru yang aktif terlibat dalam pengelolaan administrasi pembiayaan pendidikan di SDN 4 Parittiga. Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya, mencakup aspek-aspek seperti sumber pendanaan pendidikan, kendala dalam pengelolaan dana, mekanisme pelaporan, dan harapan mengenai sistem administrasi. Lamanya wawancara disesuaikan dengan jawaban informan untuk menjamin semua informasi penting dapat dicatat secara menyeluruh.

Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan metode analisis tematik. Proses analisis meliputi transkripsi wawancara, penentuan tema-tema utama yang muncul dari tanggapan informan, pengelompokan informasi berdasarkan tema, dan interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan, pengalaman, dan aspirasi informan secara menyeluruh, sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dan fleksibilitas sistem pengelolaan dana pendidikan di SDN 4 Parittiga.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum melangkah ke topik pokok, ada baiknya kita menjelaskan secara ringkas apa itu administrasi pembiayaan pendidikan.

A. Pengertian Administrasi Pembiayaan Pendidikan

Administrasi berasal dari kata *ad* berarti intensif dan *ministrare* berarti melayani, membantu, atau mengarahkan (Latin) yang kemudian diserap kedalam bahasa Inggris *administer* berarti *manage affairs* dan *administration* yang berarti *management of public affairs*. Dalam Kamus Inggris-Indonesia kata *administer* berarti mengurus, mengelola, menjalankan, melaksanakan, melakukan. Sedangkan *administration* berarti administrasi, tatausaha, pemerintahan, pemberian, pengambilan. Dari pengertian ini kata administrasi bermakna lebih sempit karena terbatas pada aktivitas ketatausahaan yaitu aktivitas pencatatan dan penyusunan keterangan yang diperoleh secara sistematis.. Itulah sebabnya administrasi sering dikaitkan dengan aktivitas administrasi tata usaha (perkantoran) yang sebenarnya administrasi tata usaha (perkantoran) hanyalah bagian dari kegiatan administrasi (Mahmud, 2015:2).

Lalu pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan(Sianturi, 2024:1).

Sedangkan Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogie*", yang akar katanya "*pais*" yang berarti anak dan "*again*" yang artinya membimbing. Jadi, "*paedagogie*" berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi "*education*". "*Education*" berasal dari bahasa Yunani "*educare*" yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang.

Batasan atau definisi pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli atau suatu bangsa tergantung dari sudut pandang yang digunakan dalam memberi arti, sehingga definisi pendidikan ini berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang memberikan definisi pendidikan yang lebih bersifat deskriptif, di mana mereka melihat dari bagaimana proses terjadinya pendidikan itu sendiri, tanpa melihat tujuan apa yang ingin dicapai. Di samping itu, ada yang mendefinisikan pendidikan berdasarkan tujuannya atau lebih bersifat normative (Syafri & Zen, 2017:26).

Sehingga dapat disimpulkan administrasi pembiayaan pendidikan dapat dipahami sebagai suatu cara untuk mengelola dana secara terencana dan teratur dalam sektor pendidikan. Proses ini melibatkan kegiatan seperti pencatatan, pengelolaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas semua sumber dana yang ada (baik dari pemerintah, orang tua, sumbangan, maupun sumber lainnya) untuk mendukung investasi dan operasional pendidikan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, administrasi pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dalam bidang pendidikan.

B. Analisis Data Lapangan

Melalui wawancara yang telah dilakukan dengan seorang guru di SDN 4 Parittiga, terungkap berbagai informasi penting mengenai sistem administrasi pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut.

1. Sumber Pembiayaan Pendidikan

SDN 4 Parittiga mayoritas bergantung pada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagai sumber dana pendidikan. Dana BOSP ini merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk keperluan operasional sekolah. Wawancara tidak mencantumkan sumber pembiayaan lain seperti iuran orang tua atau sumbangan.

2. Tantangan dalam Pengelolaan Dana Pendidikan

Salah satu hambatan utama yang sering dihadapi dalam pengelolaan dana pendidikan di SDN 4 Parittiga adalah adanya anggaran tertentu yang tidak tercantum dalam petunjuk teknis (juknis). Hal ini menyebabkan dana tersebut tidak bisa dianggarkan secara resmi, meskipun mungkin diperlukan untuk kegiatan sekolah. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakcocokan antara kebutuhan di lapangan dan regulasi yang berlaku, yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam pemanfaatan dana.

3. Mekanisme Pencatatan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Dana

Pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas dana di SDN 4 Parittiga dilakukan secara online menggunakan aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Adopsi aplikasi daring ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut telah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administratif. Namun, ketersediaan anggaran

yang tidak terdaftar dalam juknis, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dapat menjadi kendala dalam proses ini, meskipun pelaporan tetap dilakukan secara online.

4. Harapan Terkait Sistem Administrasi Pembiayaan Pendidikan ke Depan

Informan mengharapkan agar sistem administrasi pembiayaan pendidikan di masa mendatang dapat lebih baik, lebih fleksibel, dan tidak terlalu rumit dalam pelaporan. Harapan ini mencerminkan keinginan untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Fleksibilitas yang diinginkan berkaitan dengan kemampuan untuk menganggarkan kebutuhan yang mungkin tidak tercakup dalam juknis, sementara keinginan untuk menghindari kerumitan dalam laporan menunjukkan beban administratif yang saat ini dirasakan. Perbandingan Teori dan Temuan

C. Perbandingan Teori dan Temuan

Dalam perspektif teori, administrasi pembiayaan pendidikan yang efisien membutuhkan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang transparan, pencatatan yang tepat, serta pelaporan dan akuntabilitas yang jelas. Penggunaan aplikasi daring seperti RKAS di SDN 4 Parittiga sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang modern dalam pengelolaan dana. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, khususnya mengenai fleksibilitas anggaran.

Secara teori, petunjuk teknis seharusnya memfasilitasi sebagian besar kebutuhan operasional di sekolah. Namun, pengalaman dari SDN 4 Parittiga menunjukkan bahwa ada beberapa anggaran yang tidak tercatat dalam juknis, yang menandakan bahwa regulasi mungkin belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan kebutuhan di sekolah. Harapan dari informan untuk sistem yang lebih fleksibel dan tidak terlalu rumit mencerminkan kebutuhan akan keseimbangan antara prosedur administrasi yang terstandarisasi dan kebutuhan operasional yang spesifik di tingkat sekolah. Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem daring telah memfasilitasi pencatatan dan pelaporan, batasan regulasi dalam juknis masih menjadi kendala yang perlu diatasi untuk mencapai efisiensi dan adaptabilitas yang lebih baik.

Kesimpulan

Administrasi pembiayaan pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan dan kualitas pendidikan. Proses ini mencakup perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana secara sistematis dan akuntabel.

Administrasi finansial pendidikan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab adalah dasar penting dalam memastikan kelangsungan serta perbaikan mutu pendidikan. Di SDN 4 Parittiga, ketergantungan besar pada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari APBN menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembiayaan pendidikan. Namun, hal ini juga menyoroti tantangan besar, di mana adanya anggaran tertentu yang tidak diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) BOSP sering kali menghalangi penyaluran dana yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Proses pelaporan dana secara daring melalui aplikasi RKAS merupakan langkah menuju digitalisasi, namun keinginan para guru untuk sistem administrasi pembiayaan pendidikan yang lebih baik, lebih fleksibel, dan sederhana menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk perbaikan.

Menanggapi masalah ini, diperlukan langkah konkret yang berfokus pada peningkatan kemampuan adaptasi dan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan. Pertama, sangat penting bagi pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk secara rutin mengevaluasi dan memperbarui Juknis BOSP. Revisi ini harus mengarah pada lebih banyak fleksibilitas, memungkinkan alokasi persentase dana cadangan untuk kebutuhan mendesak yang tak terduga, atau memperluas jenis pengeluaran agar selaras dengan prioritas spesifik dari sekolah-sekolah di beragam daerah. Kedua, peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola dana di sekolah melalui pelatihan yang berkelanjutan sangat krusial. Pelatihan ini perlu mencakup pemahaman yang mendalam tentang peraturan terbaru, penguasaan aplikasi pelaporan daring seperti RKAS, serta strategi perencanaan anggaran yang efisien dan efektif.

Selanjutnya, pengembangan sistem pengajuan anggaran yang berbasis kebutuhan yang spesifik dan memiliki justifikasi kuat sangat penting, terutama untuk kebutuhan yang tidak tercakup dalam Juknis standar. Mekanisme ini bisa melibatkan tim peninjau dari dinas pendidikan yang mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan atau saran alternatif. Keempat, optimalisasi aplikasi RKAS sangat dibutuhkan. Aplikasi ini seharusnya terus dikembangkan agar lebih ramah pengguna, interaktif, dan mampu

mengakomodasi laporan serta pengajuan yang lebih kompleks, sejalan dengan harapan guru akan proses pelaporan yang tidak merepotkan. Terakhir, adanya pendampingan serta monitoring berjenjang dari dinas pendidikan kepada sekolah pada setiap fase pengelolaan dana—mulai dari perencanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban—akan sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan memberikan solusi yang tepat waktu.

Referensi

- Mahmud, H. (2015). *Administrasi Pendidikan*. Aksara Timur.
- Sianturi, R. (2024). *Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan*. EDU PUBLISHER.
- Syafril, & Zen, Z. (2017). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. KENCANA.